

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)

Angelina Trimurti Rambu Ana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
angelinarambu67@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
linda.ga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) Ina Huk Desa Mata Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Prinsip Akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu Integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan transparansi menggunakan 2 prinsip yaitu Informatif dengan indikator yang terdiri dari tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Prinsip selanjutnya dari transparansi yaitu pengungkapan dengan indikator yang digunakan yaitu kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil kegiatan. Jenis penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan terkait yaitu kepala desa, pengurus BUMDes dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of accountability and transparency of financial reporting at the Ina Huk Village Millik Business Entity (BUMDes), Mata Air Village, Kupang Regency, Central Kupang District. The principles of accountability used in this study are integrity, disclosure, and adherence to legislation. Meanwhile, transparency uses 2 principles, namely informative with indicators consisting of timely, clear, accurate, comparable, and easy to understand. The next principle of transparency is disclosure with the indicators used, namely financial condition, composition of management, form of planning and results of activities. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by documentation and interviews with several related informants, namely the village head, BUMDes management and several communities. The results showed that BUMDes Ina Huk has not implemented Accountability and Transparency in its financial reporting, this is because the financial reports made do not fully comply with SAK EMKM financial reporting standards.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Report.*

PENDAHULUAN

Awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima bertahap. Dana desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa bidang prioritas yang harus dilakukan desa dalam program dana desa. Salah satunya yaitu, desa harus menemukan produk unggulan wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki maksud yaitu: Menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang diperuntukkan bagi hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. Peraturan Menteri Desa No 5 tahun 2015 mengenai pendirian BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes untuk mencapai sasaran dengan maksimal maka harus menerapkan beberapa prinsip antara lain adalah Akuntabel dan Transparan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga.

Pengelola BUMDes haruslah mengelola potensi yang ada di desanya dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakannya, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukkan BUMDes. UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana.

Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan dasar tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3.026 desa dan telah terbentuk 987 BUMDes. Dari BUMDes yang telah terbentuk, terdapat 781 berstatus aktif. BUMDes Ina Huk adalah salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Kupang tepatnya Desa Mata Air. BUMDes ini terpilih menjadi salah satu BUMDes yang paling berkembang di Kabupaten Kupang. Dalam pengelolaan BUMDes Ina Huk ini terdapat dua unit usaha yang menjadi fokus pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada yakni unit pertanian dan unit pariwisata. Unit usaha tersebut dipilih karena potensinya cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Mata Air, yaitu pada unit Pariwisata dan Pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan Penelitian dengan Judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang).”

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Ihyaul Ulum mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan, Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Bagian Keempat Laporan Keuangan Pasal 55 Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. Undang-undang APBN,
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD, UU No. 17 tahun 2003 Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

7. UU yang mengatur tentang BUMDes Permendesa PDPT No 4 Tahun 2015 tentang badan Usaha Milik Desa. Bagian kelima Alokasi Hasil usaha BUMDes Pasal 26

Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak- pihak terkait. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2016; 45), menyebut transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Menurut Hari Sarbano (2007;38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan memudahkan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Kristianten (2006;73) menyebutkan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator; Kesediaan

dan aksesibilitas dokumen Kejelasan dan kelengkapan informasi Keterbukaan proses Kerangka regulasi yang menjamin transparansi Kemudahan akses informasi.

Berdasarkan penjelasan tentang transparansi dapat disimpulkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan mudah untuk di pahami, transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi dalam proses kelembagaan dan pemerintahan agar dapat di ketahui oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Menurut Medina (2012), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, yaitu :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informatif

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif adalah :

- a. Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Jelas
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- c. Akurat
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- d. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis, dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- e. Mudah diakses.
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Adapun indikator dari pengungkapan adalah :

- a. Kondisi Keuangan
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi pada periode tertentu.
- b. Susunan pengurusan
Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

Laporan Keuangan SAK EMKM dirancang khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai Undang Undang No 20 Tahun 2008 yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi dan kinerja keuangan. Informasi tersebut berguna bagi kreditor maupun investor untuk pengambilan keputusan ekonomi sekaligus pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha.

Terdapat 3 Laporan Keuangan menurut SAK EMKM :

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan laba rugi;
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian.

Laporan keuangan ini disajikan dalam bentuk dua periode/2 tahun (minimum) untuk dapat dibandingkan satu sama lain.

Permendagri No 4 tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menyebutkan di pasal 12 tentang wewenang pelaksana operasional yaitu :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Fungsi Laporan keuangan BUMDes secara umum sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan BUMDes sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja BUMDes.
2. Laporan Keuangan BUMDes sebagai alat untuk menyusun Perencanaan Kegiatan BUMDes.
3. Laporan Keuangan Bumdes sebagai alat mengendalikan kegiatan usaha BUMDes.
4. Laporan Keuangan BUMDes berguna sebagai dasar Pembuatan Keputusan pengelola BUMDes.
5. Laporan Keuangan BUMDes sebagai alat pertimbangan dan pertanggung jawaban pada pihak Ekstern.

BUMDes

BUMDes adalah badan dan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Definisi BUMDes Menurut (Maryunani, 2008: 35) yaitu "BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Seluruh proses ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

- a. Bisnis Sosial/ Serving.
- b. Keuangan/Banking.
- c. Bisnis Penyewaan/Renting.
- d. Lembaga Perantara/Brokerling.
- e. Perdagangan/Trading.
- f. Usaha Bersama/Holding.
- g. Kontraktor/Contracting.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dari pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk.

Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu Data Primer dan Sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif . Data kualitatif yaitu berupa keterangan, penjelasan, atau uraian yang berhubungan dengan penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan usaha Milik Desa Ina Huk, yang berlokasi di Jalan Timor Raya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan waktu penelitian dimulai dari Agustus tahun 2020 sampai selesai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk dengan pedoman yang telah dibuat, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. bisa berbentuk tulisan, gambar yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan BUMDes Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen.

Teknik Analisis Data

Langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Penelitian ini mulai dengan koding. Koding merupakan langkah dasar dalam operasionalisasi analisis data kualitatif. Sampai pada tahap koding artinya data lapangan (awal) sudah dikumpulkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan peneliti ke lapangan lagi untuk mengumpulkan data lagi.
2. Mengolah hasil wawancara dan pengamatan mengenai akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan pada BUMDes Ina Hu .
3. Menganalisis hasil wawancara pada pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk dengan indikator-indikator yang dapat membuktikan penerapan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan BUMDes Ina Huk
4. Mendeskripsikan tentang BUMDes Ina Huk yang menjadi objek penelitian, data hasil wawancara, dan pengamatan laporan keuangan BUMDes Ina Huk dalam sebuah narasi.
5. Membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.
Neraca
Per Desember 2019**

| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
|--------|--------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| No | Aktiva Lancar | Jumlah | Passiva | Jumlah | |
| 1. | Kas | Rp 4.803.720 | Hutang Jangka Pendek | | |
| 2. | Bank | Rp 44.487.294 | | | |
| 3. | Persediaan | Rp 29.917.256 | | | |
| 4. | Piutang | Rp 7.648.805 | | | |
| 5. | Inverstaris | Rp177.004.000 | Modal | | |
| | | | Penyertaan Dana Desa | Rp250.000.000 | |
| | | Rp263.861.075 | Penyertaan Dana Pernerdayaan Dari Masyarakat | Rp 9.400.000 | |
| | | | | Rp259.400.000 | |
| 6. | Akumulasi Penyusutan Pertanian | Rp 784.000 | | | |
| 7. | Akumulasi Penyusutan Warseda | Rp 822.300 | Penumpukan Modal | | Rp 6.031.375 |
| | | Rp 1.570.300 | | | |
| | | Rp265.431.375 | | | Rp265.431.375 |

Sumber: Diolah peneliti, 2020

**Tabel 2.
Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja
Tahun 2019**

| Anggaran | Ton | Hpp | Penjualan | Laba Kotor | Biaya | Pendapatan |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Pupuk urea non sub | 3 | Rp16.500.000 | Rp18.000.000 | Rp1.500.000 | | |
| Pupuk sp36 non sub | 6 | Rp38.100.000 | Rp42.000.000 | Rp3.900.000 | | |
| Pupuk npk non sub | 1 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp1.000.000 | | |
| Jumlah | 10 | Rp61.600.000 | Rp68.000.000 | Rp6.400.000 | Rp4.368.600 | Rp2.031.400 |
| Pakan Ternak | 4 | Rp32.400.000 | Rp34.000.000 | Rp1.600.000 | Rp 833.000 | Rp 767.000 |
| | 3 | Rp29.400.000 | Rp37.500.000 | Rp8.100.000 | Rp4.860.000 | Rp1.240.000 |
| Barang dagangan | | Rp45.717.000 | Rp50.975.500 | Rp5.257.600 | Rp3.261.000 | Rp1.996.600 |
| Obat-obatan pertanian | | | | | | |
| Pestisida | | Rp15.577.000 | Rp17.973.000 | Rp2.356.000 | Rp1.291.000 | Rp1.065.000 |
| Bibit sayur-sayuran | | Rp11.280.000 | Rp13.451.000 | Rp2.128.000 | Rp1.071.000 | Rp1.057.000 |
| Foto copy | | Rp11.280.000 | Rp24.000.000 | Rp12.720.000 | Rp7.632.000 | Rp5.088.000 |
| Biaya jasa pariwisata | | Rp15.439.500 | Rp32.850.000 | Rp17.410.500 | Rp10.446.300 | Rp6.964.200 |
| Total | | Rp339.137.400 | Rp398.709.500 | Rp59.572.100 | Rp36.122.9000 | Rp23.449.200 |

Sumber: Diolah peneliti, 2020

Tabel 3.
Laporan Laba/Rugi
Tahun 2019

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Pendapatan dari unit pertanian | Rp 19.923.299 |
| Pendapatan non operasional | Rp 241.000 |
| Pendapatan pariwisata | Rp 27.665.000 |
| | Rp 47.630.000 |
| Biaya administrasi | Rp 1.727.000 |
| Biaya transport | Rp 3.007.500 |
| Biaya pulsa listrik | Rp 822.000 |
| Biaya pengemas | Rp 90.000 |
| Biaya konsumsi | Rp 4.393.000 |
| Biaya bersih pantai | Rp 343.500 |
| Biaya tinta fotocopy | Rp 320.000 |
| Biaya servis fotocopy | Rp 550.000 |
| Biaya stempel bumdes | Rp 50.000 |
| Biaya alat fotoocopy | Rp 3.200.000 |
| Biaya tambah daya | Rp 1.124.900 |
| Biaya meb 32 ampere | Rp 90.000 |
| Biaya servis printer | Rp 50.000 |
| Biaya perjalanan dinas | Rp 60.000 |
| Biaya gaji saluran | Rp 1.538.000 |
| Biaya air tangki | Rp 1.560.000 |
| Biaya Operasional | Rp 2.455.000 |
| Biaya 2 ret tanah putih | Rp 400.000 |

Sumber: Diolah peneliti, 2020

Akuntabilitas

1. Integritas Keuangan

Hasil penelitian yang didapat peneliti pada BUMDes Ina Huk, Integritas keuangan mempunyai beberapa kriteria antara lain memuat keseluruhan posisi keuangan dari hasil wawancara kepada beberapa informan diketahui bahwa laporan keuangan BUMDes Ina Huk Sudah memuat seluruh keseluruhan posisi keuangan. keuangan BUMDes. Indikator selanjutnya dari Integritas keuangan yaitu kejelasan, dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam penyajian laporan keuangan BUMDes Ina Huk bisa dikatakan sudah jelas.

Integritas Keuangan dilihat dari laporan keuangan yang harus memuat seluruh posisi keuangan yang sebenarnya serta jelas dan dapat dimengerti. Namun,

laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk masih kurang dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku yaitu EMKM.

2. Pengungkapan

BUMDes Ina Huk sudah membuat laporan keuangan tahunan yang biasanya terdapat pada laporan pertanggungjawaban BUMDes dan akan disampaikan pada saat Musyawarah tahunan. Laporan Keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk hanya seacara sederhana dan belum memenuhi standar laporan keuangan yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum memenuhi indikator untuk melihat pengungkapan dari laporan keuangan.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu badan usaha milik pemerintah maka BUMDes juga harus melakukan segalanya berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. BUMDes Ina Huk terbentuk berdasarkan UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dalam pengelolaannya BUMDes menggunakan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar atau pedoman. BUMDes Ina Huk sejauh ini dikelola dan diawasi oleh pemerintah Desa Mata Air, mulai dari pembentukan sampai dengan pelaksanaan kegiatannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang diberikan desa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Ina Huk dibuat sesuai ketentuan yang didapat dari desa yaitu secara sistem akuntansi yang sederhana. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk belum sesuai dengan UU yang berlaku yaitu SAK EMKM. BUMDes Ina Huk belum memenuhi keseluruhan dari indikator akuntabilitas keuangan yang terdiri dari integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan prinsip akuntabilitas pada pelaporan keuangannya.

Transparansi

A. Informatif

1. Tepat waktu.
Hasil yang didapat dari pihak Informen dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk sudah tepat waktu. Namun, dilihat dari keadaan yang terjadi diketahui bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berjalan saat ini belum dibuat pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pada pembuatan laporan keuangan BUMDes belum sesuai.
2. Jelas
Hasil yang didapat pada saat wawancara kepada masyarakat dan pihak desa, diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes

Ina Huk sudah cukup jelas. Namun laporan keuangan yang jelas harus memenuhi standar yang berlaku agar dapat dimengerti oleh seluruh pihak, sedangkan laporan keuangan BUMDes Ina Huk tidak sesuai dengan laporan keuangan SAK EMKM maka dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum cukup jelas.

3. Akurat
Laporan keuangan yang akurat dapat dilihat dari komponen-komponen yang dimasukkan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk hanya menampilkan beberapa indikator atau komponen saja. Sehingga dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum akurat.
4. Dapat diperbandingkan
Hasil yang didapat dari pihak informan dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak BUMDes Ina Huk dirasa dapat dibandingkan sebagai acuan untuk kinerja kedepannya. Namun laporan keuangannya yang dibuat BUMDes Ina Huk belum sesuai standar yang ditentukan maka laporan keuangannya belum bisa dibandingkan dengan instansi lainnya yang ada. Maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk belum dapat dibandingkan karena belum sesuai dengan standar laporan keuangan.
5. Mudah diakses
Hasil wawancara yang didapat peneliti, pihak BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya, laporan tersebut diberikan kepada pihak desa dan pengawas serta pihak-pihak yang membutuhkan. Aksesibilitas dokumen disediakan bagi masyarakat yang mau atau memerlukannya, pihak BUMDes belum mempublikasikan ke media massa karena keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Pihak BUMDes juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memerlukan data.
Dari hasil yang didapat diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat

BUMDes Ina Huk belum sepenuhnya mudah diakses oleh semua pihak karena kurangnya publikasi secara luas melalui media massa dan media lainnya yang lebih mudah untuk diakses oleh semua pihak.

B. Pengungkapan

1. **Kondisi Keuangan**
Hasil penelitian dikatakan bahwa BUMDes Ina Huk sudah menunjukkan kondisi keuangan seluruhnya yang ada untuk setiap tahunnya dan disertakan dalam laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya namun laporan keuangan BUMDes Ina Huk belum memenuhi standar yang ditentukan sehingga belum menunjukkan seluruh kondisi keuangan BUMDes.
2. **Susunan pengurus**
Dalam BUMDes Ina Huk susunan pengurus atau struktur organisasi telah dibuat sejak awal pembentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap komponen kerja dalam BUMDes Ina Huk bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Susunan pengurus tersebut sudah ditetapkan sesuai SK desa yang berlaku, dengan waktu jabatan yang ditetapkan. Semua badan pengurus juga sudah bekerja sesuai dengan tugas yang didapat.
3. **Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan**
BUMDes Ina Huk juga juga membuat membuat perencanaan setiap tahunnya, perencanaan anggaran ini dibuat untuk tahun atau periode selanjut agar dapat dikerjajn atau direalisasikan. Laporan rencana anggaran ini dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan pada BUMDes Ina Huk kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah yang dibentuk dengan tujuan mengembangkan perekonomian desa. Sebagai lembaga ekonomi milik pemerintah maka BUMDes harus akuntabel dan transparan dalam sertiap pengelolaannya termasuk pelaporan keuangannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Maka penerapan akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam pengelolaannya termasuk laporan keuangan, untuk itu laporan keuangan BUMDes haruslah sesuai dengan standar laporan keuangan yang dapat dipahamai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk melihat akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan maka terdapat beberapa indikator untuk membuktikannya. Indikator untuk mengukur akuntabilitas dalam laporan keuangan yaitu: Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang, lalu indikator untuk mengukur transparansi yaitu: informatif, dan pengungkapan. Dari hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya karena belum memenuhi indikator dari kedua aspek tersebut.
3. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk masih secara yang sederhana, dan belum menggunakan laporan keuangan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan yang benar yaitu yang terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pemerintah dan Aparatur Desa Mata Air

Pemerintah dan aparatur desa haruslah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada BUMDes Ina Huk mengenai pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM, pelaporan keuangan yang baik dan benar ini dapat mempengaruhi Akuntabilitas, dan Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

2. BUMDes Ina Huk

BUMDes Ina Huk harus menggunakan SAK EMKM sebagai dasar pembuatan laporan keuangan agar lebih pihak-pihak yang membutuhkan informasi dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari entitas dan berapa banyak aset yang dimilikinya, sehingga pemerintah dan masyarakat lebih percaya kepada BUMDes.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas komponen pengelolaan BUMDes secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. Jurnal

Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1. 2006.
Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
Sarbano, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafik.
Ulum, Ihyaul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.